

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Pendidikan mencakup beberapa aspek penting, seperti transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, persiapan masa depan, dan proses berkelanjutan, pendidikan tidak terbatas pada sekolah formal. Tetapi berlangsung sepanjang hidup melalui berbagai pengalaman.

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pengingat terkait pentingnya hak dan tanggung jawab seorang warga negara, memastikan bahwa tindakan selaras dengan tujuan dan cita-cita bangsa tanpa adanya penyimpangan dari harapan. Menyadari pentingnya hal ini, bentuk pendidikan sudah terintegrasi sejak awal di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari usia dini hingga pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk mencetak pemimpin masa depan bangsa. Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 4) mengemukakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan secara luas dirumuskan meliputi proses persiapan generasi muda agar dapat dengan mudah dalam pengambilan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta pendidikan berperan secara khusus dalam aspek persekolahan, pengajaran, dan belajar yang merujuk pada persiapan tersebut”.

Bertujuan untuk mendorong pembelajaran yang efektif dan menanamkan disiplin demi kelancaran proses belajar mengajar, sekolah telah menerapkan peraturan. Aturan-aturan ini dirancang untuk mengatur semua individu dalam institusi, baik siswa maupun guru. Didirikan untuk memenuhi tujuan sekolah, ternyata masih banyak siswa yang melakukan perbuatan tercela dan melanggar pedoman yang telah ditetapkan, meskipun sudah ada peraturan dan ketentuan. Siswa yang tidak patuh

terhadap tata tertib sekolah dapat disebabkan oleh berbagai, seperti pendidikan orang tua, latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Guru PPKn memegang peranan penting dalam melatih etika dan mengajarkan etika kepada siswanya, karena materi yang disampaikan pada hakikatnya adalah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pelatihan kepada siswa agar membentuk karakter sebagai warga negara yang bermoral, sehat, berilmu, kritis dan inovatif. Guru PPKn juga harus mampu membantu dan membimbing melalui pendidikan kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah.

Oleh karena itu di dalam pembelajaran PPKn dibutuhkan tenaga pendidik yang baik mampu menuntun siswa ke dalam perilaku yang baik, salah satunya pada tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah dijadikan sebagai bentuk realisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Artinya, seluruh aturan harus ditaati dan dijalani oleh tiap-tiap komponen sekolah yang dinaungi. Dengan demikian, tata tertib diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi hidup yang kondusif di lingkungan sekolah, yang mewujudkan tujuan dasar sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, komitmen dan tanggung jawab yang besar dari siswa sangat diperlukan selaku subjek utama dalam menegakkan aturan yang ada. Siswa juga mampu melaksanakan tata tertib yg baik tentunya dengan adanya peran guru PPKn.

Peran guru di lingkungan sekolah sangat beragam. Selain menjadi pengajar, guru juga berperan untuk menegakkan peraturan sekolah dengan mendisiplinkan siswanya untuk taat tata tertib agar menciptakan lingkungan sekolah yang teratur dan nyaman. Guru yang berperan sebagai pendidik sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswanya. Guru turut andil dalam pendidikan karakter, moral, budaya, dan kebiasaan siswanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi bimbingan dan arahan terkait kedisiplinan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pembentukan karakter juga dapat diupayakan dengan menjadi tauladan

yang baik melalui sikap dan perilaku. Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai program pendidikan yang dapat memberikan pelatihan siswa agar mampu berpikir kritis, analitis, dan perilaku demokratis. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, peran guru dalam pembentukan karakter dapat diupayakan dengan menjadikan diri sebagai panutan dan teladan agar dapat diteladani oleh siswa, serta mendidik siswa agar mempunyai integritas dan disiplin dalam kesehariannya.

Seperti pelanggaran tata tertib sekolah yang terjadi di SMPN Satu Atap 1 Jayakarta yang menunjukkan ada beberapa siswa baik sengaja maupun tidak sengaja bertindak menyalahi tata tertib sekolah. Selain itu, banyak siswa memiliki perilaku penyimpangan sebab ketidakmampuan dalam pengendalian perubahan kepribadiannya. Salah satu pelanggaran disiplin di sekolah yang sangat sering terjadi yaitu keterlambatan masuk sekolah, tidak hadir di kelas dan melakukan tindak pidana. Masih banyak pelanggaran lainnya.

Sanksi bagi setiap pelanggaran peraturan sekolah berbeda-beda. Sanksi merupakan tindakan represif yang diberikan sekolah terhadap siswa yang berbuat pelanggaran terhadap aturan sekolah. Di SMPN Satu Atap 1 Jayakarta, sanksi diberikan secara progresif berupa surat peringatan dan poin kerugian untuk setiap pelanggaran. Siswa yang pertama kali melakukan pelanggaran akan mendapat bimbingan dan bimbingan akademik dari guru yang ditugaskan. Ketika pelanggaran yang dilakukan siswa cukup serius, mereka akan menerima pernyataan atau surat seruan untuk orang tua.

Dengan pemberian sanksi kepada siswa diharapkan dapat mendorong siswa untuk disiplin dan mengurangi perilaku penyimpangan serta pelanggaran moral yang sering terjadi.

Dari uraian tersebut, sehingga penulis tertarik mengambil judul “**Peran Guru PPKn dalam Menegakkan Tata Tertib Siswa di SMPN Satu Atap 1 Jayakarta**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ialah:

1. Siswa bolos ketika kegiatan belajar di sekolah sedang berlangsung.
2. Siswa terlambat datang ke sekolah.
3. Siswa tidak mengenakan seragam sesuai hari.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya, peneliti membuat pembatasan terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai peran guru PPKn dalam menegakkan tata tertib siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta dan Apa saja bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta

D. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan dan identifikasi masalah tersebut, masalah yang dikaji dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam menegakkan tata tertib siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta?
2. Apa saja bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya penelitian ini diadakan bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran guru PPKn dalam menegakkan tata tertib siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta
2. Mengetahui bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMPN Satu Atap 1 Jayakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat guna memperluas wawasan dan pengetahuan terkait peran guru PPKn dalam menegakkan tata tertib siswa, yang nantinya dapat sangat bermanfaat bagi guru ataupun siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat guna melihat seperti apa peran guru PPKn dalam menegakkan tata tertib siswa di sekolah dan dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan.

b. Bagi guru

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan pegangan atau masukan dalam mengupayakan dan menegakkan tata tertib siswa di sekolah. Dan Sebagai bahan masukan khususnya guru PPKn SMPN Satu Atap 1 Jayakarta dalam mengatasi siswa yang menyalahi aturan sekolah.

c. Bagi sekolah

Berguna bagi sekolah dalam menegakkan tata tertib di SMPN Satu Atap 1 Jayakarta, karena sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan tata tertib siswa.